

Catatan Pertemuan

Governors' Climate and Forests Taskforce Technical Meeting

Hotel Mercure Pontianak, Kalimantan Barat

9-11 Juni 2011

Pembukaan Rapat:

1. Koordinator Nasional GCF
2. *Chair* GCF
3. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat

Sesi 1: Agenda Rapat Teknis dan Diskusi *Current Condition of strategies and dynamics associated with climate change and REDD+ programs.*

1. Bagaimana cara mensinkronkan antara satgas dengan Badan REDD+
2. Bagaimana cara mensinkronkan Project Norway dengan Project Nasional
3. Apa yang perlu dilakukan pemerintah pusat untuk mendukung orsus di tingkat daerah
4. Membangun transparansi di badan SATGAS setelah kunjungan dan pertemuan di Brazil

Central Kalimantan Update

1. Proses di Kalteng sudah dimulai pada 3 tahun yang lalu yaitu dengan adanya Komisi Daerah Perubahan Iklim dengan fokus implementasi REDD+ dan mendukung informasi publik.
2. Perlu adanya sekretariat GCF lokal di tiap provinsi untuk memudahkan *knowledge transfer* dan mendukung LSM lokal.

Diskusi Lanjutan:

1. SATGAS REDD+ akan berakhir pada 30 Juni 2011 dan kelanjutannya bergantung pada keputusan Presiden.
2. Jenis komitmen yang akan diberikan oleh Kalimantan Tengah
3. Bagaimana mengapresiasi mekanisme kredit *Carbon* pada tingkat nasional dan bagaimana kita dapat membangunnya pada tingkat sub-nasional

Sesi II: Perkembangan masing-masing Provinsi

Kalimantan Timur

- Kalimantan Timur sedang berada pada tahap kesiapan dasar untuk implementasi pertumbuhan rendah karbon.
- Strategi pertumbuhan rendah karbon di Kaltim merupakan pedoman menurunkan emisi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Strategi pembangunan rendah karbon merupakan hasil analisis rinci dan telah diseluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.
- Inisiatif utama dalam strategi pembangunan rendah karbon adalah mengurangi emisi Co₂e sebesar 60% pada tahun 2030. Inisiatif untuk mencapai pertumbuhan hijau dan peluang pengurangan emisi telah diidentifikasi .

Langkah kedepan –kerangka kesiapan pertumbuhan hijau di Kalimantan Timur:

- Optimalisasi penggunaan lahan terdegradasi merupakan kunci untuk mencapai pertumbuhan hijau .
- Beberapa tantangan yang harus dihadapi dan memerlukan analisis lebih lanjut serta dukungan politik .
- Misi dan Mandat DDPI .
- DDPI telah menetapkan program kerja untuk tahun 2011-2012.
- Peran DDPI akan mengalami transformasi dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

- DDPI akan mengembangkan jaringan yang luas untuk bekerjasama.
- Tujuan yang ingin dicapai: Emisi yang berkurang, peningkatan karbon menjaga Biodiversitas.

Papua:

1. Hutan di Papua sudah terbagi dalam HPH bagaimana caranya HPH yang sudah terbagi tersebut dapat kembali pada Pemerintah Daerah.
2. Bagaimana caranya dapat membangun kerjasama Pemerintah Daerah Papua dengan Pemerintah Daerah Aceh dalam bentuk otonomi khusus.
3. Ada program green industry coklat , kelapa sawit, HTR sedang Papua lakukan 2011-2015
4. REDD stranas penting ada liniment di tingkat provinsi dan Ada orang yang ditunjuk khusus untuk menanganinya.

Aceh:

- Proses penyusunan RTRW sedang berlangsung
- Pembentukan PMU : persiapan pembentukan lembaga permanen yang akan mengelola REDD
- Penghitungan karbon: penilaian stok karbon, penilaian devorestasi, penilaian kebocoran dan risiko
- Perlibatan masyarakat;
- Penguatan peran community rangers pamhut/polhut dalam perlindungan hutan
- Optimalisasi fungsi conservation respon unit
- Penyusunan STRADA REDD+ akan dilakukan dalam tahun ini
- Evaluasi konsesi
- Proses pengakuan hak adat
- PDD ULU MASEN (VCS)

Kalimantan Barat:

1. Berkaitan dengan REDD+ bahwa Kalbar mempunyai strategi berdasarkan konsep RTRW dengan adanya 50-60% potensi hutan yang akan dikembangkan.
2. Kab Melawi dan Sintang akan terlibat dalam pengembangan REDD. Berkaitan dengan struktur pelaksanaan lapangan mekanisme kelompok kerja REDD+ baru dalam tahap penyusunan final karena ada beberapa SKPD yang perlu dimasukkan dalam struktur REDD+ di Kalimantan Barat dan dituangkan dalam bentuk SK Gubernur
3. Ada upaya penyediaan dana mandiri untuk program REDD+. Beberapa pihak swasta sudah melakukan penelitian di beberapa wilayah Finantara III, PT. Bios dan dewan adat dayak di Kab. Kubu Raya dan saat ini di fakultas kehutanan terdapat studi kecil mengenai carbon. REDD+ di Kalbar sangat tergantung pada RTRW dan dalam waktu dekat bisa didapat data- data yang diperlukan.
4. Belum terlihat konsep dari pemerintah masalah startegi REDD ini kepada masyarakat local terutama untuk wilayah yang ditunjuk pemerintah untuk REDD sehingga nantinya didapat hasil yang maksimal seperti jenis insentifnya REDD untuk mendapatkan kredit karbon kepada masyarakat local, Komoditas apa yang akan dibangun pemerintah untuk REDD di Kalimantan Barat.

Kalimantan Tengah:

- Pemda Kalteng telah melakukan pertemuan, lokakarya, seminar dan pelatihan serta percobaan pengurangan emisi gas, revitalisasi.

Hal yang menjadi poin penting pertemuan hari ini adalah

- Perlu terdokumentasi semua progres yang telah dilakukan semua Provinsi untuk REDD
- Data fakta dan informasi menjadi isu semua provinsi perlu dicari.

- *Alignment* dari Kabupaten ke Provinsi.
- Permasalahan tumpang tindih perijinan.
- Kebutuhan support koordinasi komunikasi antar anggota dengan komunikasi dengan pusat.
- Masalah isu operasional dari masing-masing daerah.
- Perlunya mensinergikan setiap anggota REDD
- Bagaimana membangun keterlibatan masyarakat dalam REDD

Sesi III: GCF Current and Future Benefits

Current Benefits

Aceh:

1. Bisa Masuk ke jaringan pasar REDD Amerika.
2. Kesempatan penguatan sub Nasional.
3. Knowledge dalam pembangunan project REDD dan standarnya.
4. Inisiatif pemerintah (leading).
5. Dukungan terhadap nasional dari lokal Sub Nasional
6. Penguatan keterlibatan masyarakat atau stakeholder.
7. Membantu G.A dalam mewujudkan cita-cita melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan / mensejahterakan rakyat.
8. Membangun system pasar karbon yang berkeadilan.
9. Merumuskan metode ARV yang baik.
10. Membangun metode FPIC yang berbasis local.

Kalimantan Tengah:

1. Sebagai awal / dasar untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
2. Menjadi alternative kerjasama pembangunan yang saling mendukung serta menguntungkan antar anggota GCF dan Negara donor.
3. Technical Assistant perlu diberikan asistensi teknis kepada anggota GCF.
4. Financing Oppurtunities mendapatkan perluasan pembiayaan untuk pembangunan daerah.

Kalimantan Barat:

1. Memahami ruang lingkup kegiatan GCF.
2. Menghimpun bahan yang terkait dengan kegiatan GCF.
3. Merancang kegiatan yang sesuai dengan program GCF.
4. Mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan GCF.
5. Melakukan langkah-langkah untuk mengimplementasikan program GCF.
6. Sebagai wadah untuk bertukar informasi dan strategi terkait deforestasi dan degradasi.
7. Memberi info terkini akan dinamika dan arahan nasional dalam menuju gagasan atau komitmen 26 % pengurangan emisi karbon deforestasi dan degradasi lahan.
8. Sebagai alat untuk mengetahui dan mempersiapkan *Frame Work* serta rancangan komitmen *Payment* karbon dari Negara yang *Emiter*.
9. Membantu komunikasi dan koordinasi dengan *Stakeholder* nasional dalam rangka *deforestasi degradasi* hutan.
10. Menjadi sentra informasi dan data base induk setiap Provinsi dalam kegiatan Deforestasi dan Degradasi.
11. Membantu mendekatkan tiap Provinsi dengan membayar karbon sesuai konstektual pemandirian.

KALIMANTAN TIMUR

1. Memberikan semangat bagi pemerintah sub nasional untuk berinisiatif dan berkontribusi dalam mengatasi persoalan perubahan iklim.
2. Menjadi sarana untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman diantara para anggota GCF untuk mengatasi persoalan perubahan iklim.
3. Menjadi sarana untuk berdialog dengan berbagai lembaga terkait perubahan iklim.
4. GCF Menjadi wadah atau Fomm tempat konsolidasi para gubernur yang memiliki hutan yang luas di Indonesia.
5. GCF dapat menjadikan atau merupakan sikap atau pendapat masing-masing gubernur atau anggotanya untuk bersuara di tingkat nasional terhadapantisipasi perubahan iklim.
6. GCF merupakan forum untuk kolaborasi, sinergitas, konsolidasi dan koordinasi program antisipasi pemanasan global dari masing-masing Provinsi.

Koordinator Nasional GCF:

1. Gaining knowledge from province and network of pioneers from government officer NGO Accademies and bussines.
2. Staying update with province development very relevant to link with national REDD+ development with regard to my position as kemitraan program coordinator of forest and climate governance as technical team in satgas REDD+

Papua:

1. Kesempatan pasar untuk REDD
2. Strategic alignment to national and international REDD organization scheme
3. Development of skill and information and provincial level
4. Building strategic legal framework for PLCD Taskforce licensing authority at provincial level

Future Benefits

Aceh:

1. Harmonisasi dengan nasional inisiatif dalam membangun mekanisme REDD.
2. Mutual benefit bagi masyarakat dan pemerintah sebagai fasilitas.
3. Kolaborasi dalam pengetahuan dan proses implementasi.
4. Compliance terhadap standard an mekanisme untuk generating credit.
5. Implementing dan operating scheme yang harus segera terwujud.
6. Standar teknis dan prosedur project REDD yang compliance dengan ARB-32
7. Membantu anggota GCF untuk membangun proyek REDD.
8. Bersama-sama mencapai keadilan dalam skema bisnis jasa lingkungan.
9. Membantu masyarakat PAD Aceh melalui REDD yang berkeadilan.
10. Transfer knowledge antar anggota GCF tentang REDD.
11. Membangun masukan dari pengalaman daerah yang lebih maju.
12. Proyek REDD yang lebih cepat atas kebersamaan anggota GCF dalam membangunnya.

Kalimantan Tengah:

1. Terciptanya tata kelola lingkungan yang lebih lestari dengan pemanfaatan yang lebih bijaksana.
2. Memberikan nilai tambah bagi masyarakat sehingga lebih menjadi sejahtera bermasyarakat.
3. Menjadi wadah/forum yang dapat menjebatani kepentingan Negara maju dan Negara berkembang dalam pelestarian lingkungan dengan memperhatikan nilai ekonomis.
4. peningkatan kapasitas anggota GCF terkait issue hutan dan iklim.
5. perlu mendukung kesekretariat GCF disetiap anggota untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi.
6. meningkatkan kapasitas anggota GCF melalui Skill Share.

7. Networking memperluas jaringan kerjasama antar Provinsi atau Negara bagian.

Kalimantan Barat:

1. Sebagai penyambung komunikasi dan kampanye Provinsi peserta ke dunia internasional.
2. Penggerak untuk bernegosiasi dengan buyer karbon potensial.
3. Adanya dukungan pembiayaan untuk kelangsungan kegiatan GCF.
4. Adanya komitmen pemerintah dari Kabupaten Provinsi dan Pusat untuk mendukung kegiatan GCF.
5. Dukungan pembiayaan yang berkesinambungan untuk melaksanakan komitmen.
6. Membangun dukungan donor dari GCF.
7. GCF harus lebih pro aktif dalam melakukan kampanye public tentang REDD, kepada multi pihak melalui iklan di teelevisis sehingga masyarakat luas bisa lebih banyak mengetahuinya.
8. Perlu mencari istilah dan slogan yang paling tepat untuk mensosialisasikan tentang pentingnya REDD dalam pembangunan yang berkelanjutan.
9. GCF perlu merancang strategi komunikasi untuk terlaksananya FPIC pada masyarakat local yang menjadi lokasi REDD.
10. Menyamakan persepsi tentang REDD antar Provinsi yang masuk sebagai anggota sehingga terbangun kesamaan konsep dalam mempersiapkan rencana implementasi REDD dalam perencanaan pembangunan rendah karbon.

Kalimantan Timur:

1. GCF menjadi suatu lembaga yang dapat diterima semua kalangan atau para pihak.
2. GCF harus dapat memberikan yang terbaik bagi perkembangan pertumbuhan pasar karbon di Indonesia.
3. GCF harus segera memiliki data base yang ter up date sehingga dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang berkepentingan.
4. Diperlukan pernyataan kelembagaan GCF sehingga ada keikutsertaan pada tingkat Provinsi.
5. GCF dapat lebih berperan dalam membangun jejaring (Network) antara para anggota GCF dengan Negara-negara pendonor atau negara pasar karbon.
6. GCF bisa menjadi sumber pengetahuan atau informasi mengenai adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bagi para anggota dan masyarakat luas.
7. GCF bisa membuka peluang bagi anggota untuk pelatihan program-program kapasitas building terkait implementasi program REDD.

Koordinator Nasional GCF

3. Belajar solusi dari sub nasional putting words to action.
4. Network for tranfarency and forest climate govermance issue.
5. Resarce mobilitation (Linking provinces and other resources institual)

Sesi IV: “ Knowledge Database Analysis”

Terlampir dalam file presentasi;

1. Why do we need the database?
2. Global REDD Overview
3. Element of the database – Part I
4. Element of the Database – Part II

RAPAT TEKNIS *GOVERNORS' CLIMATE and FOREST TASK FORCE* (GCFT)

Jum'at, 10 Juni 2011

Hotel Mercure, Pontianak

California REDD Offsets Working Group Up Date

Tony Brunello (Colorado State) :

1. Tugas Utama GCF yaitu ada beberapa pergerakan yang cepat dan lambat, dimana dibutuhkan tindakan dan realitas, yang paling penting yaitu pendanaan, ada beberapa progress untuk pendanaan Negara-negara CGF, dimana Brazil sedang bekerja keras untuk pendanaan, kemudian pengetahuan *Data Base* untuk memahami progress, dimana kegunaan data base bersifat transparansi agar semua orang dapat mengetahuinya, bagaimana cara mengembangkan dan membangun pasar.
2. Sumber-sumber dana termasuk Norwegia, California merupakan salah satu pilihan penting untuk mengetahui pasar.
3. 1 January 2012 akan dimulainya program secara legal, dimungkinkan akan terjadi penundaan sekitar antara 2-4 Bulan.
4. Struktur yang ada baru 8 %, dan 2% dari *Internasional Offsets*.
5. Peraturan untuk *Offsets* harus ditingkatkan , 4 tipe dimana kehutanan, dan 2 lagi protocol yang harus dibuat 6 Bulan ke depan, dimana para petani bagaimana menggunakan pupuk lebih baik, dimana pengurangan Sector beras dan minyak.
6. Saat ini *offsets* internasional menargetkan di komunitas lingkungan, kesehatan, orang-orang yang berpendapatan rendah, dimana perusahaan-perusahaan mengurangi komunitas berpendapatan rendah akan dimasukkan di dalam proyek ini.
7. Aturan-aturan dalam hal regulasi, dalam teks legal , kita cinta REDD tapi tidak tahu bagaimana cara mengempletiskannya. Harus ada kontrak (istilah legal) dimana ada kesepakatan California akan bekerjasama dengan kalbar, papua, aceh dsb.
8. Indonesia jauh diatas dari meksiko dari program REDD.
9. Dari semua Negara di Brazil lebih maju karena ada pemangku kebijakan, mereka secara jelas berapa uang yang masuk dan keluar di masyarakat.
10. MOU dilakukan di 3 Negara, mereka menyakan akan membangun *Technival Group Issue* seperti kita liat di task 1. Working group akan bertemu 1 tahun ini untuk membantu California dan Negara-negara lain tentang regulasi perdagangan *offsets*.
11. Kita harus memiliki jawaban-jawaban politik dibanding bisnis, *Working Group* tidak akan membuat keputusan, tetapi state yang akan melakukan keputusan. Dimana *State* akan membuat arahan-arahan yang jelas kepada negara-negara *State* yang akan dilakukan.
12. Komentar public dimana akan memiliki rekomendasi sesuai task 1 dengan GCF, monitoring MRC, dan kesepakatan yang terhubung. Akan ada dokumen yang pendek sekitar 50 halaman. Dimana ini semua merupakan rekomendasi yang kemudian akan masuk ke daerah.
13. Tindakan California yaitu mereka melakukan investasi, kami melakukan rekomendasi ini berdasarkan protocol dimana untuk maju ke *State*.
14. Awal 2013 *Offset* akan diperdagangkan di pasar kita.

Persiapan Pertemuan Tahunan GCF di Palangka Raya, Kalimantan Tengah:

1. Untuk memfinalisasi material yang akan disampaikan pada pertemuan tahunan
2. Menyiapkan keterlibatan media dan *stakeholders* dalam pertemuan
3. Memastikan Kalimantan Tengah mempersiapkan segalanya dengan baik demi kelangsungan pertemuan yang sukses

Database Update

1. Kalimantan Tengah sudah mulai mengisi template database yang diberikan
2. Kalimantan Timur sudah menyelesaikan database mereka
3. Anggota GCF lainnya akan menyelesaikan database dalam waktu satu atau dua minggu kedepan.

Diskusi Moratorium Inpres-10

Ketika lahan hutan memiliki potensi untuk penebangan maka daerah sekitarnya menjadi kawasan hutan. Ada hambatan kecil ketika hukum kita tidak diterapkan dengan benar dan lahan terbuka oleh masyarakat dengan izin yang diberikan oleh Bupati pada skala yang lebih kecil. Menindaklanjuti tindakan diambil melalui peringatan dengan otonomi kembangkan bahwa Gubernur dapat melepaskan peringatan kepada Bupati. Sebuah penegasan keseluruhan diperlukan untuk melaksanakan hukum dan peraturan, yang berarti executants dan lisensi dapat sah sesuai.

Ada dualisme regulasi yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah ketika ada seharusnya hanya satu aturan konsesi. Misalnya untuk pertanian atau halaman ada beberapa izin dan lisensi seperti AMDAL, HGU dan likasi. Dengan sejumlah besar ijin dan lisensi yang diberikan oleh Kabupaten dan Gubernur seperti pertanian, hutan rekomendasi menggunakan leasing, dan melepaskan hutan. Lahan gambut memiliki peraturan khusus dari Menteri Pertanian mengenai penggunaan lahan gambut terutama untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit.

Di Papua terdapat hampir nol laju deforestasi, namun melihat kegiatan deforestasi saat ini mungkin meningkat pesat. Tidak hanya insentif atau kompensasi yang dibutuhkan untuk orang-orang baik, tetapi juga hukuman bagi yang buruk. Moratorium adalah saat yang tepat dan kesempatan untuk mendorong pihak-pihak yang telah menerima izin penggunaan tanah mereka tetapi tidak ada kemajuan.

Di Berau moratorium terlihat terlalu sedikit untuk hutan aman karena hutan dengan kurang kritis bersyarat juga dapat dimasukkan dalam moratorium. Sebagai contoh di Kalimantan Tengah daerah yang terkena dengan moratorium lahan gambut di selatan di mana rehabilitasi tidak bekerja. Moratorium mungkin efektif, namun upaya untuk perlindungan lingkungan tidak akan efektif.

Hal ini dapat dilihat bahwa di berbagai daerah ada tanah dikontrol yang belum dimanfaatkan secara efektif. Tanah rakyat didominasi oleh pihak yang menghancurkan itu. Izin yang diberikan kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan untuk mata pencaharian. Namun bisa berbahaya jika izin sedang melewati ke pihak tak bertanggung jawab.

Moratorium yang ada saat ini tidak memiliki fungsi yang solid. Aturan dan peraturan yang diperlukan dari pemerintah karena saat ini perizinan diberikan pada tingkat yang berbeda. Anggota gugus tugas penuh memutuskan untuk memberikan penelitian atau pernyataan yang menyangkut provinsi hutan kepada Presiden dengan tembusan (cc) juga mengirim ke Hutan atau Kementerian Lingkungan Hidup.

GCFT Sepakati Turunkan Emisi 26 Persen

Minggu, 12 Juni 2011

Terkait

- [Indonesia-Jerman Kerja Sama Turunkan Emisi](#)
- [Kontribusi Hutan Penting bagi Kehidupan](#)
- [Perlu Solusi Atasi Kerusakan Hutan](#)

Pelaksanaan rapat teknis Governor's Climate and Forest Task Force (GCFT) Indonesia, 9 - 11 Juni 2011 di Kalbar, bersepakat menurunkan emisi karbon hingga 26 persen dari Business as Usual (BaU). Hasil rapat, juga menyiapkan beberapa komitmen lanjutan dari lima provinsi sebagai provinsi memiliki hutan di Indonesia.

"Rapat teknis juga menghasilkan secara bersama-sama akan memberikan masukan konstruktif yang diperlukan. Agar pelaksanaan Inpres Nomor 10 Tahun 2011 tentang moratorium hutan alam dan gambut dapat ditindaklanjuti dengan peraturan teknis yang mengikat dan mampu diimplementasikan," kata Koordinator GCFT Indonesia, Afi Mahaningtias, di Pontianak, kemarin.

Rapat teknis menurutnya, sebagai upaya mensinergikan persiapan dan rencana tindak lanjut Indonesia sebagai host pertemuan GCFT, September 2011 di, Palangkaraya (Kalteng).

Sementara, GCFT Advisor, Anthony Brunello menyatakan, dengan terbentuknya GCFT sejak 2008 lalu yang diprakarsai oleh Gubernur California, ketika itu dijabat Arnold Schwarzenegger ini, juga melibatkan langsung masyarakat setempat.

"Sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk menjaga bumi. Tentunya dengan pelaksanaan yang transparan serta terbuka dari seluruh anggota GCFT," katanya.

Anthony Brunello menyatakan, sejak GCFT didirikan, khususnya di California, masyarakat di sana lebih cermat dan kritis menyikapi perubahan iklim yang terjadi.

"Khususnya yang diakibatkan dari emisi karbon," ujarnya.

<http://kalbar-online.com/news/metropolitan/gcft-sepakati-turunkan-emisi-26-persen>

6 Provinsi Antisipasi Perubahan Iklim

Oleh Odie Krisno

- [E-mail](#)
- [Print](#)
- [PDF](#)

Published On: 12 June 2011

PONTIANAK: Kalimantan Barat bersama 5 provinsi lainnya tengah menggali informasi dan melakukan pertemuan teknis di setiap sektor untuk menyempurnakan dan melengkapi database seluruh anggota Gugus Tugas Gubernur untuk Perubahan Iklim dan Kehutanan.

Ke-5 provinsi lainnya tersebut yakni Papua, Papua Barat, Nangroe Aceh Darussalam, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Gugus Tugas Gubernur untuk Perubahan Iklim dan Kehutanan (Governor's Climate and Forest Taskforce/GCFT) ini merupakan mitra dari 16 pemerintah daerah (pemda) dari 5 negara yakni, Indonesia, Amerika Serikat, Brasil, Meksiko dan Nigeria. GCFT terbentuk sejak digagas pada pertemuan Puncak Perubahan Iklim Para Gubernur di Los Angeles, Amerika Serikat pada 2008.

"Program bersama 5 provinsi di Indonesia yang memiliki hutan terluas ini untuk mengatasi perubahan iklim, juga sangat tergantung hasil konsesus ini, serta peran GCFT," ujar Avi Mahaningtyas, Chief of Cluster, Environment and Economic Governance, kepada Bisnis, akhir pekan ini.

Avi menegaskan hasil dari data base GCFT 5 provinsi itu, diharapkan bisa menurunkan emisi karbon 26% pada 2020.

"Tidak hanya dapat menurunkan emisi 14% dari sektor hutan dan lahan, tetapi juga dari sektor energi bisa diturunkan sampai 6%," imbuhnya.

Menurut Avi, dari hasil pertemuan yang telah berlangsung di Pontianak pada 9-11 Juni, dan berlanjut September 2011 di Palangkaraya diharapkan dapat menyukseskan komitmen dan mendukung kebijakan pemerintah menurunkan emisi karbon hingga 26%. (api)

<http://www.bisnis.com/ekonomi/makro/26920-6-provinsi-antisipasi-perubahan-iklim>

Kalbar Tuan Rumah GCTF
Sabtu, 11 Juni 2011 21:57 WIBShare |

PONTIANAK, Tribunpontianak.co.id - Koordinator nasional gugusan tugas gubernur untuk perubahan iklim dan kehutanan atau Governors Climate and Forest Task Force (GCTF) Avi Mahaningtyas menyatakan, Indonesia menjadi penyumbang emisi terbesar ketiga di dunia. Penyebabnya, kebakaran hutan dan pola pengalihan lahan. Ini disampaikan Avi saat jumpa pers, di Hotel Mercure, Sabtu (11/6).

Untuk menekan tingginya emisi di Indonesia tersebut, GCTF selaku mitra pemerintah mengadakan pertemuan teknis di Kalbar. Kalbar merupakan satu di antara enam anggota GCTF Indonesia.

Terpilihnya Kalbar sebagai tempat pelaksanaan rapat teknis GCTF merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan teknis di Jakarta sebelumnya. Saat itu, Kalbar ditunjuk oleh seluruh anggota GCTF.

"Tujuan kita adalah mendorong pelaksanaan Inpres Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Moratorium Hutan Alam dan Gambut dapat ditindaklanjuti dengan peraturan teknis yang mengikat dan mampu diimplementasikan oleh semua provinsi, khususnya 9 provinsi berhutan di antaranya di Kalbar," ujar Avi.

Project Coordinator Oedes GCTF, Yosef Lejo mengatakan, saat ini untuk di wilayah Kalbar sedang dalam proses pengumpulan data.

Menurutnya, jika pengumpulan data telah rampung, informasi tersebut akan dibawa ke Colorado, Amerika Serikat, sebagai bahan informasi secara internasional mengenai kondisi lingkungan dan hutan yang ada di Indonesia khususnya di Kalbar.

Ia berharap, pertemuan teknis di wilayah Kalbar bisa membangun upaya untuk menyiapkan beberapa komitmen lanjutan dari lima provinsi lainnya untuk sama-sama menindaklanjuti dan mensukseskan kebijakan pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi karbon sebesar 26 persen.

"Dibandingkan anggota GCTF lainnya di Indonesia, Kalbar masih ketinggalan. Target kita sampai 15 Juni ini semua data bisa rampung dan akan dikirim ke Colorado. Informasi ini bisa menjadi bahan pertimbangan Pemda untuk memberikan ruang hutan dan masyarakat di sekitar hutan agar tetap sejahtera," pungkasnya.

Penulis : Galih Priatmojo
Editor : admin
Sumber : Tribun Pontianak